



LAKIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN
KAPUAS HULU

2019

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas di Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, serta terselesaikannya penyusunan LAKIP 2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Pemerintahan yang baik ditandai dengan tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya yaitu transparan, partisipasi dan akuntabilitas.

LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan kegiatan, program, kebijakan dengan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019.

Putussibau, 28 Februari 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Dra. Hj. Linda Purnama, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690823 198803 2 002

DAFTAR ISI

	Hal
KATA	i
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	6
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	8
B. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	13
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
B. Realisasi Anggaran	20
BAB IV : PENUTUP	21

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

LAMPIRAN 1: STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN 2: PERJANJIAN KINERJA

LAMPIRAN 3: TARGET DAN REALISASI KINERJA

LAMPIRAN 4: REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) didasarkan pada Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan LAKIP tahun 2019 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah dinyatakan bahwa Kepala OPD menyusun laporan kinerja tahunan

berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan berada di bawah serta bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut (bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terlampir pada lampiran 1) :

- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten Sekretaris Daerah
- c. Kepala Bagian
- d. Kepala Sub Bagian
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretaris Daerah dibantu 3 (tiga) orang Asisten yaitu Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi dan Umum. Adapun ruang lingkup tugas Asisten Sekretaris Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Asisten Pemerintahan, dibantu oleh :
 - 1) Bagian Pemerintahan
 - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Otonomi Daerah;
 - c) Sub Bagian Perwakilan.
 - 2) Bagian Hukum
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi.
 - 3) Bagian Pertanahan
 - a) Subbagian Inventarisasi dan Administrasi Pertanahan;
 - b) Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan.

- 4) Bagian Kesatuan Bangsa
 - a) Sub Bagian Pembinaan Wawasan Kebangsaan
 - b) Sub Bagian Ketahanan Sosial
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dibantu oleh :
 - 1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan
 - a) Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Bina Produksi;
 - c) Subbagian Pengendalian dan Pelaporan.
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - a) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - b) Sub Bagian Agama dan Budaya.
 - 3) Bagian Pengadaan Barang / Jasa
 - a) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan barang / Jasa;
 - b) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa;
 - c) Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- c. Asisten Administrasi dan Umum, dibantu oleh :
 - 1) Bagian Organisasi
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Tatalaksana;
 - c) Sub Bagian Kebijakan Aparatur.
 - 2) Bagian Hubungan Masyarakat
 - a) Subbagian Hubungan Masyarakat;
 - b) Subbagian Protokol.
 - 3) Bagian Umum
 - a) SubBagian Program Keuangan;
 - b) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - c) Subbagian Aparatur dan Tata Usaha.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Daerah;
- b. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. penetapan kebijakan teknis pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah;
- d. pemberian petunjuk teknis terhadap kegiatan perangkat daerah;
- e. pembinaan dan pendayagunaan aparatur Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- f. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah serta menyampaikannya kepada Bupati;
- g. pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah secara periodik; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Keberhasilan suatu organisasi atau unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sangat ditentukan oleh jumlah aparatur yang tersedia baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara keseluruhan jumlah aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 140 orang dan jumlah tenaga kontrak di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 56 orang.

Komposisi pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan / Ruang dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 1, Keadaan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan:

TINGKAT PENDIDIKAN									JML
SD	SLTP	SLTA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S1	S.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	3	43	-	0	15	9	45	25	140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	3	43	-	0	15	9	45	25	140

Sumber: Subbagian Personil dan Tata Usaha

Tabel 2, Keadaan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Menurut Golongan/Ruang:

GOLONGAN / RUANG													JML
1/c	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	5	18	7	32	25	22	10	4	8	5	1	140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	5	18	7	32	25	22	10	4	8	5	1	140

Sumber: Subbagian Personil dan Tata Usaha

Tabel 3, Keadaan Sumber Daya Tenaga Kontrak Menurut Tingkat Pendidikan:

TINGKAT PENDIDIKAN									JML
SD	SLTP	SLTA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S1	S.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	40	-	1	2	0	9	0	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	40	-	1	2	0	9	0	56

Sumber: Subbagian Personil dan Tata Usaha

5. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan yang berupa tersedianya dana/anggaran setiap tahunnya merupakan salah satu faktor pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkungan Sekretariat Daerah. Secara umum bahwa dukungan

sumber daya keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selama ini sangat mencukupi untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

6. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menggunakan sarana dan prasarana yang terdiri dari :

Tabel 4, Keadaan Sarana dan Prasarana:

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Gedung Kantor : a. Ruang Kerja Staf b. Ruang Pimpinan c. Gudang d. Toilet	37 buah 18 buah 2 buah 10 buah
2.	Kendaraan : a. Kendaraan Roda Dua b. Kendaraan Roda Empat	98 unit 31 unit
3.	Sarana Pendukung dan Perlengkapan lainnya : a. Komputer b. Mesin Tik c. Pesawat Telepon/Faximile d. Kursi Rapat e. Meja Rapat f. CPU g. Printer h. Meja Kerja 1 Biro i. Meja Kerja 1/2 Biro j. Kursi Kerja	32 unit 18 unit 27 unit 96 unit 11 unit 30 unit 52 unit 24 unit 82 unit 10 unit

Sumber : Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Beberapa isu strategis diprediksi akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, setidaknya sampai dengan tahun 2019. Isu strategis tersebut akan digunakan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang dihadapi dan untuk memberikan arah bagi perumusan berbagai program kegiatan Sekretariat Daerah pada tahun-tahun mendatang. Dalam melaksanakan dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah terdapat beberapa isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap Satuan Kerja Perangkat belum optimal;
2. Organisasi perangkat Kabupaten Kapuas Hulu belum tepat fungsi dan tepat ukur (*right sizing*);
3. Sistem dan prosedur kerja birokrasi belum efektif dan efisien;
4. Inkonsistensi dalam penetapan peraturan perundang-undangan;
5. Sistem perencanaan, penganggaran dan sistem akuntabilitas kinerja belum terintegrasi secara sinergi;
6. Pengembangan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum optimal;
7. Rendahnya kompetensi sumber daya aparatur;
8. Sistem penilaian kinerja dalam penerapan *reward and punishment* belum optimal.

Kemajuan teknologi informasi memberikan peluang untuk dimanfaatkan secara luas termasuk dalam pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal peningkatan dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dapat didukung oleh penerapan pelayanan kepada publik secara efektif dan efisien. Pelayanan publik yang didukung oleh teknologi informasi dalam lingkup pemerintahan dikenal dengan istilah *Electronic-Government*. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan bertujuan agar terbentuk Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, serta perbaikan organisasi, sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada awal setiap tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu, juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijaksanaan dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program dan kegiatan beserta indikator kinerjanya sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategisnya.

A. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan dokumen taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, sesuai dengan prioritas dan kebutuhan organisasi.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Sekretaris Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan sedapat mungkin tiga tolok ukur, yaitu masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*).

Agar Rencana Strategis yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat bagi peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad,

kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap pegawai yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan responsif terhadap perkembangan situasi yang terjadi baik bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Guna merealisasikan dan mewujudkan Visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, kemudian misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis, dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja untuk tahun tertentu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2019 merupakan implementasi Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu periode tahun 2016 – 2021, sebagai tolok ukur pelaporan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

1. Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu akan diarahkan dan apa yang akan dicapai.

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcomes*).

Bertolak dari pemikiran tersebut, maka dirumuskan Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

“PROFESIONAL DALAM KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PELAYANAN GUNA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

- (1) **Profesional** dalam visi tersebut mencerminkan rangkaian tindakan yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah untuk dilakukan atau tidak dilakukan didasarkan atas pertimbangan prinsip-prinsip rasionalitas keilmuan dan etika.
- (2) **Koordinasi** yang baik adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berupaya menciptakan dan membentuk pola koordinasi yang terpadu, tepat, cepat dan sistematis antar OPD dan Instansi/lembaga lainnya dalam meningkatkan sinergitas penyelenggara Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan.
- (3) **Tata Kelola Pemerintahan yang baik** adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menerapkan azas-azas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta menjaga keseimbangan unsur-unsur pemerintahan, privat dan *civil society* sebagai komponen pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

2. Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Selaras dengan gambaran masa depan dari Visi Sekretaris Daerah yaitu Terwujudnya Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Organisasi yang Profesional dalam Koordinasi dan Pelayanan Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan misi sebagai berikut :

- 1) **Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pelayanan Administratif;**
- 2) **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (good governance);**
- 3) **Mewujudkan Koordinasi Perumusan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Profesional.**

Keberadaan ketiga misi tersebut memiliki nilai strategis karena akan menciptakan sinergitas positif untuk mendukung tercapainya visi yang telah ditetapkan. Upaya mewujudkan kualitas pelayanan administratif pemerintah yang tertib, akuntabel dan berkeadilan, serta membangun tata kelola pemerintah yang baik dan diselenggarakan dengan prinsi-prinsip transparansi, partisipasi, demokrasi, akuntabilitas, efesien, responsif serta mewujudkan kebijakan umum pemerintah daerah yang efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Kemudian Sasaran adalah penjabaran dari Tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau triwulanan.

Berdasarkan dari Misi Mewujudkan peningkatan kualitas pembinaan dan pelayanan administratif, ditetapkan satu tujuan yaitu Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan Sekretariat Daerah, dari tujuan tersebut ditetapkan 3 (tiga) sasaran berupa meningkatnya kompetensi, komitmen dan kapabilitas aparatur Sekretariat Daerah, meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, dan meningkatnya tertib administrasi.

Selanjutnya dari Misi Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*good governance*) ditetapkan tujuan yaitu Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkualitas. Dari tujuan tersebut ditetapkan 5 (lima)

sasaran yaitu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, meningkatnya sektor perekonomian daerah, meningkatkan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan kerukunan kehidupan beragama, meningkatkan pengelolaan dan pengamanan pertanahan, dan meningkatkan sistem komunikasi, informasi dan media massa.

Kemudian untuk Misi Mewujudkan Koordinasi perumusan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah yang cermat dan akuntabel ditetapkan tujuan yaitu mewujudkan kebijakan umum pemerintah daerah yang efektif, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari tujuan tersebut ditetapkan 2 (dua) sasaran yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan sistem koordinasi dan evaluasi dalam perumusan kebijakan dan keterpaduan antar satuan kerja.

Secara utuh pemaparan dari Tujuan dan Sasaran dari masing-masing Misi tertuang dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5. Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama

MISI	TUJUAN	SASARAN	IKU
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pelayanan Administratif	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Kelembagaan Sekretariat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Sakip Unsur Pelaporan Nilai LPPD
		Meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Persentase pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui E-Procurement
		Meningkatnya efektifitas pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Daerah	Persentase Aset Tanah Bersertifikat
Mewujudkan Penyelenggaraan pemerintahan yang Baik (good governance)	Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	Nilai IKM
Mewujudkan Koordinasi Perumusan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Profesional	Mewujudkan kebijakan umum pemerintah daerah yang efektif, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	meningkatnya kualitas kelembagaan ekonomi daerah dan rumusan kebijakan dibidang perekonomian	BUMD Sehat

B. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Perjanjian Kinerja menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan renstra, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahun 2019. Perjanjian kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, serta menjadi komitmen bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya yang meliputi indikator *inputs*, *outputs* dan *outcomes*. Dokumen Perjanjian Kinerja juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Penetapan indikator-indikator kinerja baik pada tingkat sasaran maupun pada tingkat kegiatan, harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisir, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Adapun perjanjian kinerja Setingkat Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 sebagaimana terlampir (lampiran 2).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan terlebih dahulu melaksanakan *Review Renstra* dan IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Hasil pengukuran atas IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 menunjukkan hasil sesuai data. Target dan realisasi Kinerja Tahun 2019 terlampir (lampiran 3).

Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Dari tabel Pengukuran Kinerja tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat dua indikator dalam sasaran meningkatnya akuntabilitas dan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu Nilai Sakip unsur Pelaporan dan Nilai LPPD. Dalam indikator Nilai Sakip unsur Pelaporan terdapat target Nilai "B" dengan realisasi "B", sedangkan dalam indikator Nilai LPPD terdapat target Nilai "B" dengan realisasi "B". dengan demikian dari kedua indikator tersebut dapat diperoleh capaian kinerja sebesar 100 %. Realisasi kelancaran dalam pelaksanaan tugas – tugas kedinasan di lingkungan Sekretariat Daerah yaitu sesuai target sebanyak 37 kegiatan berjalan dengan lancar dan sasaran ini tergolong sangat berhasil.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan ditunjang melalui kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2. Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
3. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD
4. Penyusunan RKA dan DPA SKPD
5. Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan HUT RI
6. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Telekomunikasi Daerah
7. Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Kota Putussibau
8. Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan HUT Prov. Kalimantan Barat
9. Penyelenggaraan Peringatan Hari Otonomi Daerah
10. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja Sekretariat Daerah
11. Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD
12. Penyusunan LAKIP Kab. Kapuas Hulu
13. Penyusunan jurnal dan buku besar Sekretariat Daerah
14. Rapat Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa
15. Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kab. Kapuas Hulu
16. Penyusunan Formasi ASN Kabupaten Kapuas Hulu
17. Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah
18. Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
19. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kapuas Hulu

20. Pembinaan, Penataan dan Peningkatan Tugas dan Fungsi Unit Kerja Perangkat Daerah
21. Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah pada Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)
22. Koordinasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
23. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
24. Pendokumentasian Produk Hukum Daerah
25. Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH)
26. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan
27. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Kab.Kapuas Hulu
28. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kapuas Hulu
29. Penyusunan Revisi Perda kabupaten Datiu II kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 1979 tentang Lambang Daerah Kabupaten II Kapuas Hulu
30. Pemutakhiran Data Infrastrukturnya Kabupaten Kapuas Hulu
31. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu
32. Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan di Kabupaten Kapuas Hulu
33. Percepatan dan pengendalian Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu
34. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyaluran Penggunaan Dana Tidak Terduga
35. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
36. Inventarisasi Data Rupabumi kecamatan
37. Rapat Kerja Perangkat Daerah

Sasaran 2. Meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah

Dalam sasaran meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah terdapat indikator Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-procurement dengan target 100 % dan realisasi 97,16 %, dengan jumlah realisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja cukup berhasil.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana ditunjang melalui kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
2. Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
3. Pendampingan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
4. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Tenis Pengadaan Barang dan Jasa
5. Sosialisasi Peraturan Tentang Pengadaan Barang/Jasa
6. Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
7. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan aplikasi e-Procurement
8. Pemutakhiran Data Pengguna Aplikasi E-Procurement pada LPSE Kapuas Hulu

Sasaran 3. Meningkatnya efektifitas pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Daerah

Dalam sasaran Meningkatnya efektifitas pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Daerah terdapat indikator persentase aset tanah bersertifikat yang mana target aset tanah kabupaten Kapuas Hulu yang bersertifikat sebanyak 50 %. Dari hasil kinerja selama tahun 2019, sekretariat daerah mampu merealisasikan target tersebut sebanyak 50 % aset tanah bersertifikat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, dengan demikian dapat dikatakan bahwa sasaran Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah sangat berhasil.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah ditunjang kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan Tanah keperluan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
2. Pengurusan Sertifikasi Tanah Keperluan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
3. Inventarisasi dan Monitoring Tanah Milik Pemerintah Daerah
4. Penataan Batas-Batas Wilayah Antar Kecamatan
5. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik

Dalam sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik terdapat indikator Persentase Nilai IKM dengan target 100 %. Berdasarkan kinerja tahun 2019 maka diperoleh nilai 79 % dengan demikian target tidak tercapai secara maksimal namun cukup berhasil.

Capaian kinerja sasaran meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik didukung kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6. Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
8. Penyediaan Alat Tulis Kantor
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
14. Penyediaan Makanan dan Minuman
15. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
16. Pengadaan Meubelair
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Rumah Jabatan
18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
19. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
20. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional
21. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
22. Penyediaan Jasa Sewa Rumah Jabatan
23. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas
24. Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
25. Rehabilitasi Sedang / Berat gedung Fasilitas Umum
26. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan
27. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
28. Penyelenggaraan Senam Pagi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Kapuas Hulu
29. Pendidikan dan pelatihan formal
30. Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD

31. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas
32. Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD
33. Pemeliharaan Komputerisasi Keuangan dan Akuntansi Isntansi
34. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
35. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
36. Pengembangan Sistem Aplikasi Data Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
37. Peliputan ekpose, Pendampingan dan Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah
38. Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Bidang Kehumasan dan Protokol
39. Pelayanan Keprotokolan Pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
40. Pembinaan Ormas, LSM dan OKP
41. onitoring Pemeriksa Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
42. Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah
43. Fasilitas penyelenggaraan Bantuan Sosial
44. Fasilitas Penyelenggaraan Ibadah Haji
45. Pasilitasi Penerimaan Beasiswa Mahasiswa Kedokteran
46. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat
47. Fasilitas penyelenggaraan Hibah
48. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Kebudayaan
49. Penyusunan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial (sosial, kemiskinan, kesehatan)
50. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pemerintahan
51. Evaluasi dan Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
52. Kerjasama Berita dengan media Cetak
53. Penyebarluasan Informasi Pemerintahan dan Pembangunan
54. Pencitraan dan Publikasi Pemerintah
55. Forum Kerukunan Antar Umat Beragama
56. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Cinta Tanah Air
57. Pencegahan dan Deteksi Dini AGHT (KOMINDA)
58. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Penyalahgunaan Narkotika
59. Penanganan Konflik Sosial
60. Fasilitas Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
61. Fasilitas Peringatan Hari Kesaktian Pancasila
62. Pendidikan Wawasan Kebangsaan
63. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai Luhur Budaya Bangsa
64. Fasilitas Penyelenggaraan Peringatan Hari Lahir Pancasila
65. Fasilitas Penyelenggaraan Apel Hari Bela Negara
66. Forum Pembauran Kebangsaan
67. Fasilitas Pelaksanaan PILEG dan PILPRES

Sasaran 5. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Ekonomi Daerah dan Rumusan Kebijakan dibidang Perekonomian

Dalam sasaran Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Ekonomi Daerah dan Rumusan Kebijakan dibidang Perekonomian terdapat dua indikator yaitu persentase perumusan kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti dan persentase BUMD sehat.

Untuk indikator persentase perumusan kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti terdapat target 100 % dengan hasil 100 % perumusan kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti pada tahun 2019. Sedangkan untuk indikator persentase BUMD sehat terdapat target 100 % dari 4 BUMD yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Dari hasil kinerja pembinaan BUMD tersebut tercapai 3 BUMD yang sehat dan BUMD yang tidak sehat sehingga capaian kerjanya sebesar 75 %. Dari hasil tersebut pada sasaran Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Ekonomi Daerah dan Rumusan Kebijakan dibidang Perekonomian dapat dikatakan cukup berhasil.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Ekonomi Daerah dan Rumusan Kebijakan dibidang Perekonomian didukung kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah
2. Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Promosi Produk Unggulan Daerah (Pertanian, Perikanan dan Pariwisata)
3. Pembinaan dan Pengawasan BUMD di Kabupaten Kapuas Hulu
4. Penyusunan kebijakan Bina Sarana Perekonomian Daerah (SDA dan Energi)

B. REALISASI ANGGARAN

Adapun realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019 total Rp. 46.170.934.800; dengan realisasi sebesar 42.800.918.332 dengan persentase 92,70 %. Adapun realisasi anggaran per Program dan Kegiatan Tahun 2019 terlampir (lampiran 4).

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima sebagaimana tercermin dalam tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya yang dikelola dalam bentuk dana, personil, sarana prasarana serta faktor-faktor pendukung lainnya.

Dengan melihat gambaran capaian kinerja masing –masing program pada penjelasan bab sebelumnya mengenai akuntabilitas kinerja, maka terlihat bahwa hampir seluruh dana yang dialokasikan terserap semuanya, walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan disebabkan keterbatasan waktu dan berbagai faktor penghalang lainnya.

Dalam rangka mewujudkan Good Governance serta memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kualitas pelayanan umum, maka langkah – langkah antisipatif yang telah dilaksanakan antara lain dengan terus mensosialisasikan produk-produk hukum, meningkatkan kualitas SDM aparatur, dan meningkatkan kualitas dan fasilitas pelayanan umum serta pelayanan administrasi. Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang tercermin dalam capaian kinerja program yang telah dilaksanakan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Namun hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat

memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun demikian, berbagai kebijakan dan program perlu ditelaah kembali untuk mencapai cita-cita pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat. LAKIP perlu dijadikan salah satu sumber pertimbangan pembuatan kebijakan dan program ditahun 2020 dan tahun – tahun sesudah nya agar meningkatkan kualitas dan manfaat yang tercermin pada kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan.

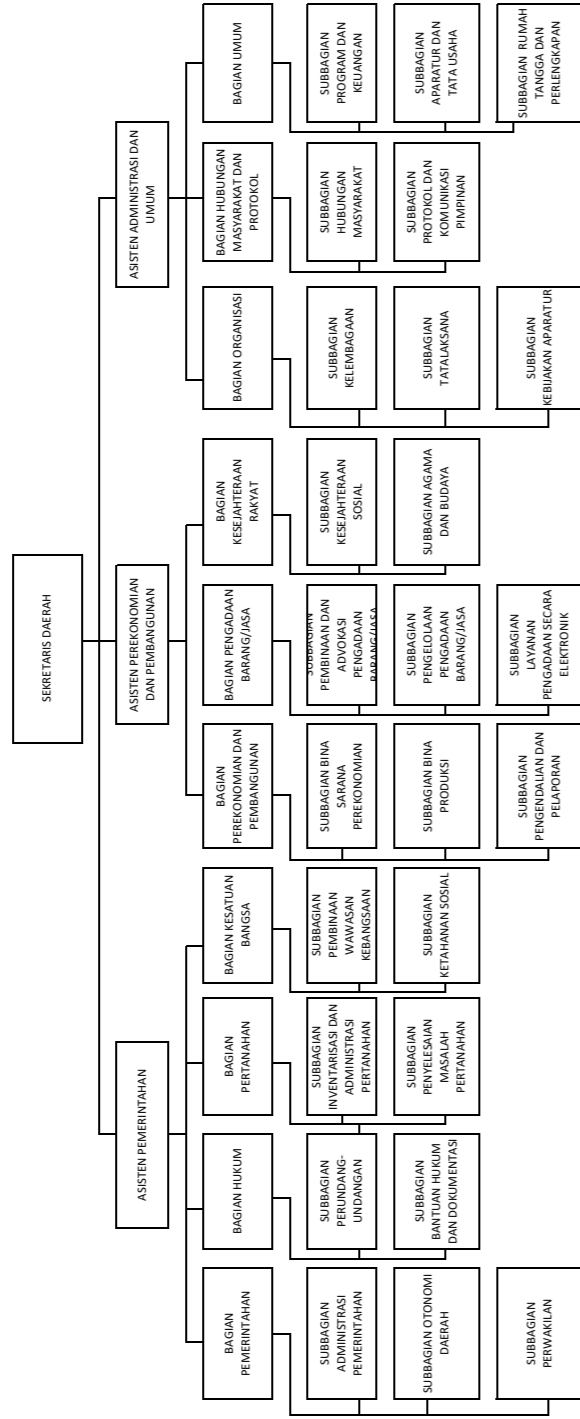
B. SARAN

LAKIP perlu dijadikan salah satu sumber pertimbangan pembuatan kebijakan dan program ditahun 2020 dan tahun – tahun selanjutnya agar dapat meningkatkan kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Lampiran 1

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

LAMPIRAN
 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 66 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
 SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU



Lampiran 2
 Perjanjian Kinerja
 di Lingkungan Sekretariat Daerah
 Kabupaten Kapuas Hulu



DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. SARBANI, S.E.,M.AP

Jabatan : Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : A.M. NASIR, S.H

Jabatan : BUPATI KAPUAS HULU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ttd

A.M. NASIR, S.H

ttd

H. SARBANI, S.E.,M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610415 198608 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIS DAERAH**

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Sakip Unsur Pelaporan	B
		Nilai LPPD	B
2	Meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Persentase pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	100%
3	Meningkatnya efektifitas pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Daerah	Persentase Aset Tanah Bersertifikat	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	Persentase Nilai IKM	100%
5	Meningkatnya kualitas kelembagaan ekonomi daerah dan rumusan kebijakan dibidang perekonomian	Persentase perumusan kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase BUMD Sehat	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 15,483,251,100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 8,238,416,000
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Rp 485,000,000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 836,833,000
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 1,407,572,000
6	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Rp 1,516,010,400
7	Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 2,226,327,500
8	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Rp 444,587,000
9	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Rp 339,668,000
10	Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Rp 734,214,900
11	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Rp 72,724,000
12	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 790,473,000
13	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Rp 815,425,600
14	Program Penguatan LSM, Ormas dan Organisasi Sosial Politik	Rp 112,120,000
15	Peningkatan dan pengembangan Bidang Sosial	Rp 2,817,486,100
16	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp 3,801,994,100
17	Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Rp 919,530,600
18	Peningkatan Dan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan daerah	Rp 687,648,000
19	Kerjasama Informasi Dan Media Massa	Rp 943,520,000
20	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Rp 155,919,000

21	Pencegahan Tindak Kriminal	Rp	435,080,000
22	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp	475,246,000
23	Pendidikan Politik Masyarakat	Rp	241,609,000

Putussibau, Januari 2019

Pihak Kedua
BUPATI KAPUAS HULU

ttd

A.M. NASIR, S.H.

Pihak Pertama
PJ. SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SARBANI, S.E., M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610415 198608 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABANG CHAIRUL SALEH, S.H., M.M.

Jabatan : Pjt. ASISTEN PEMERINTAHAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. SARBANI, S.E., M.AP.

Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ttd

ttd

H. SARBANI, S.E., M.AP.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610415 198608 1 003

ABANG CHAIRUL SALEH, S.H., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650223 199303 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 ASISTEN PEMERINTAHAN

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah	% pengadaan barang dan jasa melalui eprocurement	100%
2	Meningkatnya kematangan kelembagaan ULP	Tingkat kematangan ULP	5 Tingkatan
3	Meningkatnya Peringkat EKPPD	Peringkat EKPPD	45
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan	Persentase Kecamatan yang menerapkan PATEN	100%
5	Meningkatnya kejelasan batas daerah	Persentase kejelasan batas daerah	100%
6	Meningkatnya Aset tanah Bersertifikat	Persentase aset Tanah Bersertifikat	100%
7	Meningkatnya efektifitas penanganan konflik pertanahan	Persentase konflik pertanahan yang ditindaklanjuti	100%
8	Meningkatnya kualitas pembentukan produk hukum daerah	Persentase penetapan produk hukum daerah sesuai dengan standar	100%
9	Meningkatnya evaluasi produk hukum daerah	Persentase Peraturan produk hukum daerah yang dievaluasi	100%
10	Meningkatnya pemberdayaan kelompok sadar hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase kelompok sadar hukum aktif	100%
11	Meningkatnya kewaspadaan dini terhadap potensi konflik	Persentase potensi Konflik yang tidak menjadi konflik	100%
12	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban	Persentase kelompok masyarakat yang difasilitasi	100%
13	Meningkatnya pembinaan kelompok masyarakat	Persentase Ormas dan LSM aktif	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 129,500,000
2	Pengadaan Mebeulair	Rp 27,000,000
3	Pendidikan dan pelatihan formal	Rp 513,773,000
4	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 1,566,433,500
5	Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	Rp 143,065,000
6	Pendampingan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 325,705,000
7	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Tenis Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 118,797,000
8	Sosialisasi Peraturan Tentang Pengadaan Barang/Jasa	Rp 72,327,000
9	Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Rp 291,880,000
10	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan aplikasi e-Procurement	Rp 23,700,000
11	Pemutakhiran Data Pengguna Aplikasi E-Procurement pada LPSE Kapuas Hulu	Rp 24,088,000
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 1,500,000
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 110,400,000
14	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Rp 40,000,000
15	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp 7,000,000
16	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 4,650,000
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 5,000,000

18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp	6,000,000
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan	Rp	2,400,000
20	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp	56,175,000
21	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp	85,000,000
22	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Rp	25,000,000
23	Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Kota Putussibau	Rp	527,754,000
24	Fasilitas Penyelenggaraan Peringatan HUT Prov. Kalimantan Barat	Rp	28,245,000
25	Penyelenggaraan Peringatan Hari Otonomi Daerah	Rp	24,197,000
26	Pengadaan Mebeulair	Rp	20,000,000
27	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Rp	10,000,000
28	Fasilitas Kerjasama Antar Daerah pada Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)	Rp	72,724,000
29	Penyusunan Revisi Perda kabupaten Datiu II kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 1979 tentang Lambang Daerah Kabupaten II Kapuas Hulu	Rp	62,262,000
30	Penataan Batas-Batas Wilayah Antar Kecamatan	Rp	132,414,500
31	Penyusunan LPPD dan EKPPD	Rp	214,228,000
32	Inventarisasi Data Rupabumi kecamatan	Rp	109,082,000
33	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pemerintahan	Rp	135,272,000
34	Rapat Kerja Perangkat Daerah	Rp	155,560,000
35	Evaluasi dan Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Rp	73,506,000
36	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp	281,500,000
37	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp	101,250,000
38	Pengadaan Tanah Keperluan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	Rp	2,583,175,600
39	Pengurusan Sertifikasi Tanah Keperluan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	Rp	401,515,000
40	Inventarisasi dan Monitoring Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	Rp	684,889,000
41	Fasilitas Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Rp	919,530,600
42	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	19,000,000
43	Koordinasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Rp	164,139,000
44	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	148,687,000
45	Pendokumentasian Produk Hukum Daerah	Rp	64,372,000
46	Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informas	Rp	43,964,000
47	Evaluasi Peraturan Perundang-undangan	Rp	63,726,000
48	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Kab.Kapuas Hulu	Rp	181,624,000
49	Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kapuas Hulu	Rp	61,699,000
50	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	3,000,000
51	Fasilitas Penyelenggaraan PeringatanHUT RI	Rp	404,630,000
52	Rapat Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa	Rp	168,687,000
53	Pembinaan Ormas, LSM dan OKP	Rp	41,989,000
54	Monitoring Pemeriksa Administrasi Bantuan Keuangan Kepe	Rp	70,131,000
55	Forum Kerukunan Antar Umat Beragama	Rp	77,367,000
56	Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Cinta Tanah Air	Rp	78,552,000
57	Pencegahan dan Deteksi Dini AGHT (KOMINDA)	Rp	131,707,000
58	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Penyalahgunaan Narkotika	Rp	76,346,000
59	Penanganan Konflik Sosial	Rp	227,027,000
60	Fasilitas Peringatan Hari Kebangkitan Nasional	Rp	61,009,000
61	Fasilitas Peringatan Hari Kesaktian Pancasila	Rp	62,286,000

62	Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Rp	86,417,000
63	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai Luhur Budaya Bangsa	Rp	70,555,000
64	Fasilitas Penyelenggaraan Peringatan Hari Lahir Pancasila	Rp	63,726,000
65	Fasilitas Penyelenggaraan Apel Hari Bela Negara	Rp	60,426,000
66	Forum Pembauran Kebangsaan	Rp	70,827,000
67	Fasilitas Pelaksanaan PILEG dan PILPRES	Rp	241,609,000

Putussibau, Januari 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Pj. SEKRETARIS DAERAH

Pt. ASISTEN PEMERINTAHAN

ttd

ttd

H. SARBANI, S.E., M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610415 198608 1 003

ABANG CHAIRUL SALEH, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650223 199303 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUNG TOMO, S.Hut., M.M.

Jabatan : Plt. Asisten Perencanaan dan Pembangunan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. SARBANI, S.E., M.AP.

Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ttd

ttd

H. SARBANI, S.E., M.AP.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610415 198608 1 003

BUNG TOMO, S.Hut., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700604 199803 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah	% pengadaan barang dan jasa melalui eprocurement	100%
2	Meningkatnya kematangan kelembagaan ULP	Tingkat kematangan ULP	5 Tingkatan
3	Terfasilitasinya kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan	Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang	100%
4	Meningkatnya pengelolaan hibah dan bantuan sosial	Persentase bantuan Hibah bansos yang tersalurkan	100%
		Persentase penerima bansos dan hibah yang menyampaikan laporan tepat	100%
5	Meningkatnya perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial yang	100%
6	Meningkatnya kualitas kelembagaan BUMD	Persentase kegiatan yang diselesaikan tepat waktu	100%
7	Meningkatnya pengendalian Pembangunan	Persentase umlah BUMD Sehat	100%
8	Meningkatnya perumusan kebijakan di bidang perekonomian	Persentase jumlah kebijakan di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 129,500,000
2	Pengadaan Mebeulair	Rp 27,000,000
3	Pendidikan dan pelatihan formal	Rp 187,250,000
4	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 1,566,433,500
5	Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	Rp 143,065,000
6	Pendampingan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 325,705,000
7	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Tennis Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 118,797,000
8	Sosialisasi Peraturan Tentang Pengadaan Barang/Jasa	Rp 72,327,000
9	Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Rp 291,880,000
10	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan aplikasi e-Procurement	Rp 23,700,000
11	Pemutakhiran Data Pengguna Aplikasi E-Procurement pada LPSE Kapuas Hulu	Rp 24,088,000
12	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Rp 355,568,840
13	Fasilitasi penyelenggaraan Bantuan Sosial	Rp 220,056,100
14	Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji	Rp 1,096,123,380
15	Fasilitasi Penerimaan Beasiswa Mahasiswa Kedokteran	Rp 250,705,400
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat	Rp 54,459,900
17	Fasilitasi penyelenggaraan Hibah	Rp 230,208,660
18	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Kebudayaan	Rp 797,757,180
19	Penyusunan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial (sosial, kemiskinan, kesehatan)	Rp 94,355,250
20	Pendidikan dan pelatihan formal	Rp 23,060,000
21	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah	Rp 175,429,400
22	Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Promosi Produk Unggulan Daerah (Pertanian, Perikanan dan Pariwisata)	Rp 221,116,000
23	Pembinaan dan Pengawasan BUMD di Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 202,886,000

24	Penyusunan kebijakan Bina Sarana Perekonomian Daerah (SDA dan Energi)	Rp	126,390,000
25	Pemutakhiran Data Infrastrukturnya di Kabupaten Kapuas Hulu	Rp	154,653,600
26	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu	Rp	225,334,000
27	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan di Kabupaten Kapuas Hulu	Rp	114,226,000
28	Percepatan dan pengendalian Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu	Rp	254,437,000
29	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyaluran Penggunaan Dana Tidak Terduga	Rp	66,775,000



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs.H. MUHAMMAD YUSUF, M.M.

Jabatan : Asisten Administrasi dan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. SARBANI, S.E., M.AP.

Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Pj. SEKRETARIS DAERAH

Pt. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

ttd

ttd

H. SARBANI, S.E., M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610415 198608 1 003

BUNG TOMO, S.Hut., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590816 198503 1 014

Putussibau, Januari 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ttd

ttd

H. SARBANI, S.E., M.AP.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610415 198608 1 003

Drs.H. MUHAMMAD YUSUF, M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590816 198503 1 014

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM**

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya kualitas laporan kinerja instansi pemerintah	Persentase Penyampaian Laporan Kinerja Tepat Waktu	100%
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Publik OPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	100%
3	Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah	Persentase OPD tepat ukuran tepat fungsi	100%
4	Meningkatnya penyebaran informasi pembangunan daerah	Persentase penyebarluasan informasi pembangunan daerah	100%
5	Meningkatnya Penerapan Implementasi SAKIP	Persentase nilai kepuasan pelayanan kedinasan kepala daerah	100%
6	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima	Persentase kecukupan layanan administrasi perkantoran	100%
7	Terwujudnya kualitas sarana dan prasarana kerja yang memadai	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	100%
8	Terwujudnya Disiplin Aparatur yang tinggi	Persentase kehadiran aparatur dalam satu tahun	100%
9	Terwujudnya kapasitas Aparatur yang profesional	Persentase Aparatur yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyusunan LAKIP Kab. Kapuas Hulu	Rp 143,112,000
2	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Rp 370,026,000
3	Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kab. Kapuas Hulu	Rp 133,457,000
4	Penyusunan Formasi ASN Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 180,499,000
5	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Rp 87,328,000
6	Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 106,220,000
7	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 101,149,000
8	Pembinaan, Penataan dan Peningkatan Tugas dan Fungsi Unit Kerja Perangkat Daerah	Rp 125,561,900
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 85,000,000
10	Peliputan ekpose, Pendampingan dan Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah	Rp 447,544,000
11	Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Bidang Kehumasan c	Rp 173,958,000
12	Pelayanan Keprotokolanan Pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 444,587,000
13	Kerjasama Berita dengan media Cetak	Rp 730,000,000
14	Penyebarluasan Informasi Pemerintahan dan Pembangunan	Rp 113,000,000
15	Pencitraan dan Publikasi Pemerintah	Rp 100,520,000
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 58,000,000
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 2,716,000,000
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 480,000,000
19	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas / Operasional	Rp 200,000,000
20	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 192,480,000
21	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Rp 486,000,000
22	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp 217,400,000
23	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 219,452,200
24	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 416,500,000
25	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp 201,500,000
26	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 166,000,000
27	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 882,500,000
28	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 1,753,000,000

29	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp	2,675,000,000
30	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Rp	1,000,000,000
31	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	Rp	1,500,092,000
32	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Rp	23,337,900
33	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Telekomunikasi Daerah	Rp	295,754,000
34	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Rp	613,000,000
35	Pengadaan Mebeulair	Rp	261,000,000
36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan KebersihanRumah Jabatan	Rp	317,500,000
37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Rp	61,500,000
38	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Rp	81,500,000
39	Pemeliharaan rutin/berkala KendaraanDinas / Operasional	Rp	3,200,000,000
40	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Rp	700,000,000
41	Penyediaan Jasa Sewa Rumah Jabatan	Rp	65,000,000
42	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas	Rp	586,593,000
43	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Rp	838,273,000
44	Rehabilitasi Sedang / Berat gedung Fasilitas Umum	Rp	1,176,300,000
45	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Rp	314,500,000
46	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Rp	81,500,000
47	Penyelenggaraan Senam Pagi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Kapuas Hulu	Rp	89,000,000
48	Pendidikan dan pelatihan formal	Rp	300,000,000
49	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtis arrealisasi kinerja Sekretariat Daerah	Rp	8,093,000
50	Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD	Rp	14,375,000
51	Penyusunan jurnal dan buku besarSekretariat Daerah	Rp	10,143,000
52	Pelaksanaan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas	Rp	22,265,000
53	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas	Rp	85,278,000
54	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	Rp	476,430,000
55	Pemeliharaan Komputerisasi Keuangan dan Akuntansi Instansi	Rp	167,200,000
56	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Rp	9,150,000
57	Pengembangan Sistem Aplikasi Data Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Rp	101,500,000

Putussibau, Januari 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Pj. SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM

ttd

ttd

H. SARBANI, S.E., M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610415 198608 1 003

Drs. H. MUHAMMAD YUSUF, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590816 198503 1 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. ETTY PUDJIASTUTI, S.IP, M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : ABANG CHAIRUL SALEH, S.H., M.M.

Jabatan : Plt. Asisten Pemerintahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ttd

ttd

ABANG CHAIRUL SALEH, S.H., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650223 199303 1 007

Hj. ETTY PUDJIASTUTI, S.IP, M.Si
PEMBINA Tk. I
NIP. 19700703 199001 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Peringkat EKPPD	Peringkat EKPPD	45
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan	Persentase Kecamatan yang menerapkan PATEN	100%
3	Meningkatnya kejelasan batas daerah	Persentase kejelasan batas daerah	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 1,500,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 103,200,000
3	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Rp 40,000,000
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp 7,000,000
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 5,115,000
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 5,500,000
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp 6,600,000
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan	Rp 2,640,000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 61,792,500
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp 93,500,000
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Rp 27,500,000
12	Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Kota Putussibau	Rp 527,754,000
13	Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan HUT Prov. Kalimantan Barat	Rp 28,245,000
14	Penyelenggaraan Peringatan Hari Otonomi Daerah	Rp 24,197,000
15	Pengadaan Mebeulair	Rp 22,000,000
16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Rp 10,000,000
17	Pendidikan dan pelatihan formal	Rp 6,600,000
18	Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah pada Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)	Rp 72,724,000
19	Penyusunan Revisi Perda kabupaten Datiu II kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 1979 tentang Lambang Daerah Kabupaten II Kapuas Hulu	Rp 62,262,000
20	Penataan Batas-Batas Wilayah Antar Kecamatan	Rp 132,414,500
21	Penyusunan LPPD dan EKPPD	Rp 214,228,000
22	Inventarisasi Data Rupabumi kecamatan	Rp 109,082,000
23	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pemerintahan	Rp 135,272,000
24	Rapat Kerja Perangkat Daerah	Rp 155,560,000
25	Evaluasi dan Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Rp 73,506,000

Putussibau, 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN

ttd

ttd

ABANG CHAIRUL SALEH, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650223 199303 1 007

Hj. ETTY PUDJIASTUTI, S.IP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19700703 199001 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LEONARDUS PASCALIS RETIBO, S.IP.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Hj. ETTY PUDJIASTUTI, S.IP, M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ttd

ttd

Hj. ETTY PUDJIASTUTI, S.IP, M.Si
PEMBINA Tk. I
NIP. 19700703 199001 2 001

LEONARDUS PASCALIS RETIBO, S.IP.
PENATA
NIP. 19810408 200803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terlaksananya Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Jadi Kota Putussibau ke 124 Tahun 2019	Peringatan Hari Jadi Kota Putussibau ke 124 Tahun 2019	100%
2	Tersusunnya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Lambang Daerah	Dokumen Peraturan Daerah	1 Perda
3	Terlaksananya Penataan Batas Administrasi Daerah	Dokumen Penataan Batas	5 Dokumen
4	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2018	Dokumen LPPD	1 Dokumen
5	Terlaksananya Inventarisasi dan Verifikasi Data Rupabumi	Updating Data Pembakuan Rupabumi Unsur Buatan	3 Kecamatan

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Kota Putussibau	Rp 527,754,000
2	Penyusunan Revisi Perda kabupaten Datu II kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 1979 tentang Lambang Daerah Kabupaten II Kapuas Hulu	Rp 62,262,000
3	Penataan Batas-Batas Wilayah Antar Kecamatan	Rp 132,414,500
4	Penyusunan LPPD dan EKPPD	Rp 214,228,000
5	Inventarisasi Data Rupabumi kecamatan	Rp 109,082,000

Putussibau, 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN

**KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN**

ttd

ttd

Hj. ETTY PUDJIASTUTI, S.IP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19700703 199001 2 001

LEONARDUS PASCALIS RETIBO, S.IP
Penata
NIP. 19810408 200801 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYISY AQLIMA, S. STP., M.Si.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Hj. ETTY PUDJIASTUTI, S.IP, M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ttd

ttd

Hj. ETTY PUDJIASTUTI, S.IP, M.Si
PEMBINA Tk. I
NIP. 19700703 199001 2 001

SYISY AQLIMA, S. STP., M.Si.
PENATA
NIP. 19861121 200412 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA SUB BAGIAN PERANGKAT DAERAH

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terlaksananya Upacara Peringatan HUT Pemprov Tahun 2019	Upacara HUT Pemprov Tahun 2019	1 Kegiatan
2	Terlaksananya Upacara Peringatan Hari Otonomi daerah Tahun 2019	Upacara Hari Otonomi Daerah	1 Kegiatan
3	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Pada APKASI	Pembayaran Iuran APKASI tepat Waktu	1 Kegiatan
4	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pemerintahan	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pemerintahan	60 Kegiatan
5	Terlaksananya Rapat Kerja Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Peserta	100%
6	Terlaksananya Kegiatan Evaluasi dan Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persentase Kecamatan yang Menerapkan PATEN	50%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan HUT Prov. Kalimantan Barat	Rp 28,245,000
2	Penyelenggaraan Peringatan Hari Otonomi Daerah	Rp 24,197,000
3	Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah pada Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)	Rp 72,724,000
4	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pemerintahan	Rp 135,272,000
5	Rapat Kerja Perangkat Daerah	Rp 155,560,000
6	Evaluasi dan Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Rp 73,506,000

Putussibau, 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN

KEPALA SUB BAGIAN PERANGKAT DAERAH

ttd

ttd

Hj. ETTY PUDJIASTUTI, S.IP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19700703 199001 2 001

SYISY AQLIMA, S. STP., M.Si
Penata
NIP. 19861121 200412 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURBAITI, S. AB

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perwakilan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Hj. ETTY PUDJIASTUTI, S.IP, M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ttd

ttd

Hj. ETTY PUDJIASTUTI, S.IP, M.Si

PEMBINA Tk. I
NIP. 19700703 199001 2 001

NURBAITI, S. AB

PENATA Tk. I
NIP. 19650729 199002 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA SUB BAGIAN PERWAKILAN

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana pada Mess Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada Mess Pemerintah Daerah Rehab dan Perbaikan Sarana dan Prasarana pada Mess Pemerintah Daerah	100%
2	Meningkatnya kejelasan batas daerah	Presentase Pelayanan pada Mess Pemerintah Daerah	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 1,500,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 103,200,000
3	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Rp 40,000,000
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp 7,000,000
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 5,115,000
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 5,500,000
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp 6,600,000
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan	Rp 2,640,000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 61,792,500
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp 93,500,000
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Rp 27,500,000
12	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Rp 10,000,000

Putussibau, 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN

KEPALA SUB BAGIAN PERWAKILAN

ttd

ttd

Hj. ETTY PUDJIASTUTI, S.IP, M.Si

Pembina Tk. I
NIP. 19700703 199001 2 001

NURBAITI, S.AB

Penata Tk. I
NIP. 19650729 199002 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELISABET ROSLIN, S.H.,M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : ABANG CHAIRUL SALEH, S.H., M.M.

Jabatan : Plt. Asisten Pemerintahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

ttd

ABANG CHAIRUL SALEH, S.H., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650223 199303 1 007

Putussibau, Januari 2019

PIHAK PERTAMA,

ttd

ELISABET ROSLIN, S.H.,M.Si
PEMBINA
NIP. 19671105 199003 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA BAGIAN HUKUM

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya kualitas pembentukan produk hukum daerah	Persentase penetapan produk hukum daerah sesuai dengan standar	100%
2	Meningkatnya evaluasi produk hukum daerah	Persentase Peraturan produk hukum daerah yang dievaluasi	100%
3	Meningkatnya pemberdayaan kelompok sadar hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase kelompok sadar hukum aktif	100%

No	Kegiatan		Anggaran
1	Koordinasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Rp	164,139,000
2	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	148,687,000
3	Pendokumentasian Produk Hukum Daerah	Rp	64,372,000
4	Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH)	Rp	43,964,000
5	Evaluasi Peraturan Perundang-undangan	Rp	63,726,000
6	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Kab.Kapuas Hulu	Rp	181,624,000
7	Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kapuas Hulu	Rp	61,699,000

Putussibau, Juni 2019

Pihak Kedua

Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN

ttd

ABANG CHAIRUL SALEH, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650223 199303 1 007

Pihak Pertama

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ELISABET ROSLIN, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19671105 199003 2 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANSELA SARATING, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : ELISABET ROSLIN, S.H.,M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ttd

ELISABET ROSLIN, S.H.,M.Si
PEMBINA
NIP. 19671105 199003 2 010

ttd

ANSELA SARATING, S.H., M.H.
PENATA Tk. I
NIP. 19760126 200401 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan oleh Pejabat Sekretariat Daerah dan Staf Bagian Hukum	Persentase Efektivitas Koordinasi /Konsultasi Masalah Hukum dan Penyelesaian Produk Hukum Daerah	100%
2	Terlaksananya Kegiatan Legislasi terhadap Rancangan Produk Hukum daerah	Tersusunnya Jumlah Produk Hukum Daerah	10 Perda, 30 Perbub dan 500 Keputusan Bupati

No	Kegiatan	Anggaran
1	Koordinasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Rp 164,139,000
2	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 148,687,000

Putussibau, Juni 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BAGIAN HUKUM

KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN

ttd

ELISABET ROSLIN, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19671105 199003 2 010

ttd

ANSELA SARATING, S.H.,M.H
Penata TK. I
NIP. 19760126 200401 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RATNA JUWITA, S.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : ELISABET ROSLIN, S.H.,M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ttd

ttd

ELISABET ROSLIN, S.H.,M.Si
PEMBINA
NIP. 19671105 199003 2 010

RATNA JUWITA, S.H.
PENATA
NIP. 19780326 200803 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN DOKUMENTASI

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya kualitas pembentukan produk hukum daerah	Persentase penetapan produk hukum daerah sesuai dengan standar	100%
2	Meningkatnya evaluasi produk hukum daerah	Persentase Peraturan produk hukum daerah yang dievaluasi	100%
3	Meningkatnya pemberdayaan kelompok sadar hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase kelompok sadar hukum aktif	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pendokumentasian Produk Hukum Daerah	Rp 64,372,000
2	Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH)	Rp 43,964,000
3	Evaluasi Peraturan Perundang-undangan	Rp 63,726,000
4	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Kab.Kapuas Hulu	Rp 181,624,000
5	Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kapuas Hulu	Rp 61,699,000

Putussibau, Juni 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BAGIAN HUKUM

KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN DOKUMENTASI

ttd

ttd

ELISABET ROSLIN, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19671105 199003 2 010

RATNA JUWITA, S.H
Penata
NIP. 19780326 200803 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUDOLFUS ADJI WINURSITO, S.Sos., M.A.P.

Jabatan : Kepala Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : ABANG CHAIRUL SALEH, S.H., M.M.

Jabatan : Plt. Asisten Pemerintahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ttd

ttd

ABANG CHAIRUL SALEH, S.H., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650223 199303 1 007

RUDOLFUS ADJI WINURSITO, S.Sos., M.A.P.
PEMBINA Tk. I
NIP. 19700521 199101 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA BAGIAN PERTANAHAN

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Aset tanah Besertifikat	Persentase aset Tanah Besertifikat	100%
2	Meningkatnya efektifitas penanganan konflik pertanahan	Persentase konflik pertanahan yang ditindaklanjuti	100%

No	Kegiatan		Anggaran
1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp	309,650,000
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp	111,375,000
3	Pendidikan dan pelatihan formal	Rp	199,357,400
4	Pengadaan Tanah Keperluan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	Rp	2,841,493,160
5	Pengurusan Sertifikasi Tanah Keperluan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	Rp	441,666,500
6	Inventarisasi dan Monitoring Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	Rp	753,377,900
7	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Rp	1,011,483,660

Putussibau,

Juni 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN

KEPALA BAGIAN PERTANAHAN

ttd

ttd

ABANG CHAIRUL SALEH, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650223 199303 1 007

RUDOLFUS ADJI WINURSITO, S.Sos., M.A.P.
Pembina Tk. I
NIP. 19700521 199101 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PANE PASOGIT, S. STP., M.Si.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : RUDOLFUS ADJI WINURSITO, S.Sos., M.A.P.

Jabatan : Kepala Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ttd

R. ADJI WINURSITO, S.Sos., M.A.P.
PEMBINA Tk. I
NIP. 19700521 199101 1 001

ttd

PANE PASOGIT, S. STP., M.Si.
PENATA
NIP. 19871109 200602 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA SUB BAGIAN PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya efektifitas penanganan konflik pertanahan	Persentase konflik pertanahan yang ditindaklanjuti	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Rp 919,530,600

Putussibau, Juni 2019

Pihak Kedua

KEPALA BAGIAN PERTANAHAN

ttd

RUDOLFUS ADJI WINURSITO, S.Sos., M.AP.
Pembina Tk. I
NIP. 19700521 199101 1 001

Pihak Pertama

**KEPALA PENYELESAIAN MASALAH
PERTANAHAN**

ttd

PANE PASOGIT, S.STP, M.Si
Penata
NIP. 19871109 200602 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PAULUS GANCIL

Jabatan : Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Administrasi Pertanahan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : RUDOLFUS ADJI WINURSITO, S.Sos., M.A.P.

Jabatan : Kepala Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ttd

ttd

RUDOLFUS ADJI WINURSITO, S.Sos., M.A.P.
PEMBINA Tk. I
NIP. 19700521 199101 1 001

PAULUS GANCIL
PENATA MUDA Tk. I
NIP. 19630425 198603 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA SUB BAGIAN INVENTARISASI DAN ADMINISTRASI PERTANAHAN

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Aset tanah Besertifikat	Persentase aset Tanah Besertifikat	100%

No	Kegiatan	Anggaran
4	Pengadaan Tanah Keperluan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 2,583,175,600
5	Pengurusan Sertifikasi Tanah Keperluan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 401,515,000
6	Inventarisasi dan Monitoring Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 684,889,000

Putussibau, Juni 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BAGIAN PERTANAHAN

**KEPALA SUB BAGIAN INVENTARISASI DAN
ADMINISTRASI PERTANAHAN**

ttd

ttd

RUDOLFUS ADJI WINURSITO, S.Sos., M.A.P.
Pembina Tk. I
NIP. 19700521 199101 1 001

PAULUS GANCIL
Penata
NIP. 19630425 198603 1 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUMADI KAMARSYAH, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Kepala Bagian Kesatuan Bangsa Sekretariat Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : FRANS LEONARDUS, SH. MH

Jabatan : Asisten Pemerintahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ttd

FRANS LEONARDUS, SH. MH.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610314 198801 1 001

ttd

JUMADI KAMARSYAH, S.Sos., M.Si.
PEMBINA Tk. I
NIP. 19620323 198503 1 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA BAGIAN KESATUAN BANGSA

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya kewaspadaan dini terhadap potensi konflik	Persentase potensi Konflik yang tidak menjadi konflik	100%
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban	Persentase kelompok masyarakat yang difasilitasi	100%
3	Meningkatnya pembinaan kelompok masyarakat	Persentase Ormas dan LSM aktif	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 3,300,000
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan HUT RI	Rp 445,093,000
3	Pendidikan dan pelatihan formal	Rp 57,389,200
4	Rapat Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa	Rp 185,555,700
5	Pembinaan Ormas, LSM dan OKP	Rp 46,187,900
6	Monitoring Pemeriksa Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Rp 77,144,100
7	Forum Kerukunan Antar Umat Beragama	Rp 85,103,700
8	Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Cinta Tanah Air	Rp 86,407,200
9	Pencegahan dan Deteksi Dini AGHT (KOMINDA)	Rp 144,877,700
10	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Penyalahgunaan Narkotika	Rp 83,980,600
11	Penanganan Konflik Sosial	Rp 249,729,700
12	Fasilitasi Peringatan Hari Kebangkitan Nasional	Rp 67,109,900
13	Fasilitasi Peringatan Hari Kesaktian Pancasila	Rp 68,514,600
14	Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Rp 95,058,700
15	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai Luhur Budaya Bangsa	Rp 77,610,500
16	Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Hari Lahir Pancasila	Rp 70,098,600
17	Fasilitasi Penyelenggaraan Apel Hari Bela Negara	Rp 66,468,600
18	Forum Pembauran Kebangsaan	Rp 77,909,700
19	Fasilitasi Pelaksanaan PILEG dan PILPRES	Rp 265,769,900

Putussibau, 2019

Pihak Kedua

ASISTEN PEMERINTAHAN

ttd

FRANS LEONARDUS, SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19610314 198801 1 001

Pihak Pertama

KEPALA BAGIAN KESATUAN BANGSA

ttd

JUMADI KAMARSYAH, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19620323 198503 1 017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PIUS BUDA

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan Wawasan Kebangsaan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : JUMADI KAMARSYAH, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Kepala Bagian Kesatuan Bangsa Sekretariat Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ttd

JUMADI KAMARSYAH, S.Sos., M.Si.
PEMBINA Tk. I
NIP. 19620323 198503 1 017

ttd

PIUS BUDA
PENATA Tk. I
NIP. 19630522 198703 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pembinaan Wawasan Kebangsaan, Ideologi, Kewaspadaan Nasional, Karakter Bangsa, Penanganan Konflik dan Politik Dalam Negeri	Persentase potensi Konflik yang tidak menjadi konflik	100%
2	Pembinaan Kebijakan dan Pengawasan di Bidang Pembinaan Wawasan Kebangsaan, Ideologi, Kewaspadaan Nasional, Karakter Bangsa, Penanganan Konflik dan Politik Dalam Negeri	Persentase potensi Konflik yang tidak menjadi konflik	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan HUT RI	Rp 445,093,000
2	Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Cinta Tanah Air	Rp 86,407,200
3	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Penyalahgunaan Narkotika	Rp 83,980,600
4	Fasilitasi Peringatan Hari Kebangkitan Nasional	Rp 67,109,900
5	Fasilitasi Peringatan Hari Kesaktian Pancasila	Rp 68,514,600
6	Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Rp 95,058,700
7	Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Hari Lahir Pancasila	Rp 70,098,600
8	Fasilitasi Penyelenggaraan Apel Hari Bela Negara	Rp 66,468,600

Putussibau, 2019

Pihak Kedua

KEPALA BAGIAN KESATUAN BANGSA

ttd

JUMADI KAMARSYAH, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19620323 198503 1 017

Pihak Pertama

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN

ttd

PIUS BUDA
Penata Tk. I
NIP. 19630522 198703 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SULAIMAN, S.PKP., M.M.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Ketahanan Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : JUMADI KAMARSYAH, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Kepala Bagian Kesatuan Bangsa Sekretariat Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ttd

ttd

JUMADI KAMARSYAH, S.Sos., M.Si.
PEMBINA Tk. I
NIP. 19620323 198503 1 017

SULAIMAN, S.PKP., M.M.
PENATA
NIP. 19680708 200502 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA SUB BAGIAN KETAHANAN SOSIAL

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban	Persentase kelompok masyarakat yang difasilitasi	100%
2	Meningkatnya pembinaan kelompok masyarakat	Persentase Ormas dan LSM aktif	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Rapat Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa	Rp 185,555,700
2	Pembinaan Ormas, LSM dan OKP	Rp 46,187,900
3	Monitoring Pemeriksa Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Rp 77,144,100
4	Forum Kerukunan Antar Umat Beragama	Rp 85,103,700
5	Pencegahan dan Deteksi Dini AGHT (KOMINDA)	Rp 144,877,700
6	Penanganan Konflik Sosial	Rp 249,729,700
7	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai Luhur Budaya Bangsa	Rp 77,610,500
8	Forum Pembauran Kebangsaan	Rp 77,909,700
9	Fasilitasi Pelaksanaan PILEG dan PILPRES	Rp 265,769,900

Putussibau, 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama

ASISTEN PEMERINTAHAN

KEPALA SUB BAGIAN KETAHANAN SOSIAL

ttd

ttd

FRANS LEONARDUS, SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19610314 198801 1 001

SULAIMAN, SPKP., M.M
Penata TK. I
NIP. 19680807 200502 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUSTINUS STORMANDI,SE,M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : BUNG TOMO,S.Hut,M.M

Jabatan : Plt.Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari

2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ttd

BUNG TOMO,S.Hut,M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700604 199803 1 009

ttd

AGUSTINUS STORMANDI,SE,M.Si
PEMBINA Tk.I
NIP. 19670805 199403 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya kualitas kelembagaan BUMD	Persentase kegiatan yang diselesaikan tepat waktu	100%
2	Meningkatnya pengendalian Pembangunan	Persentase umlah BUMD Sehat	100%
3	Meningkatnya perumusan kebijakan di bidang perekonomian	Persentase jumlah kebijakan di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	100%

No	Kegiatan		Anggaran
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Rp	25,366,000
2	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah	Rp	192,972,340
3	Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Promosi Produk Unggulan Daerah (Pertanian, Perikanan dan Pariwisata)	Rp	243,227,600
4	Pembinaan dan Pengawasan BUMD di Kabupaten Kapuas Hulu	Rp	223,174,600
5	Penyusunan kebijakan Bina Sarana Perekonomian Daerah (SDA dan Energi)	Rp	139,029,000
6	Pemutakhiran Data Infrastruktur di Kabupaten Kapuas Hulu	Rp	170,118,960
7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu	Rp	247,867,400
8	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan di Kabupaten Kapuas Hulu	Rp	125,648,600
9	Percepatan dan pengendalian Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu	Rp	279,880,700

Putussibau, 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Plt. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

ttd

BUNG TOMO, S.Hut., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590816 198503 1 014

ttd

AGUSTINUS STORMANDI, S.E., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 197100805 199403 1 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAULIZA,S.Hut

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bina Produksi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : AGUSTINUS STORMANDI,SE,M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Juni 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ttd

AGUSTINUS STORMANDI,SE,M.Si
PEMBINA Tk.I
NIP. 19670805 199403 1 015

ttd

MAULIZA,S.Hut
PENATA Tk.I
NIP. 19770302 200701 2 020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA SUB BAGIAN BINA PRODUKSI

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Produk Unggulan	Persentase Kebijakan yang ditindaklanjuti	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah	Rp 175,429,400
2	Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Promosi Produk Unggulan Daerah (Pertanian, Perikanan dan Pariwisata)	Rp 221,116,000

Putussibau, 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

KEPALA SUB BAGIAN BINA PRODUKSI

ttd

ttd

AGUSTINUS STORMANDI, S.E., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 197100805 199403 1 015

MAULIZA, S.Hut
Penata Tk. I
NIP. 19770302 200701 2 020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDIYATMA,S.E., M.M.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : AGUSTINUS STORMANDI,SE,M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Juni 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ttd

ttd

AGUSTINUS STORMANDI,SE,M.Si
PEMBINA Tk.I
NIP. 19670805 199403 1 015

EDIYATMA,S.E., M.M.
PENATA
NIP. 19880703 201101 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA SUB BAGIAN BINA SARANA PEREKONOMIAN

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya kualitas kelembagaan BUMD	Persentase kegiatan yang diselesaikan tepat waktu	100%
2	Meningkatnya perumusan kebijakan di bidang perekonomian	Persentase jumlah kebijakan di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pembinaan dan Pengawasan BUMD di Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 223,174,600
2	Penyusunan kebijakan Bina Sarana Perekonomian Daerah (SDA dan Energi)	Rp 139,029,000

Putussibau, 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

KEPALA SUB BAGIAN BINA SARANA PEREKONOMIAN

ttd

ttd

AGUSTINUS STORMANDI, S.E., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 197100805 199403 1 015

SURRAHMAN SAAT, SE
Penata
NIP. 19731016 201001 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAMBALI, S.T.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : AGUSTINUS STORMANDI,SE,M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ttd

ttd

AGUSTINUS STORMANDI,SE,M.Si

PEMBINA Tk.I

NIP. 19670805 199403 1 015

HAMBALI, S.T.

PENATA TK. I

NIP. 19800621 200502 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA SUB BAGIAN PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya pengendalian Pembangunan	Persentase Percepatan Pengendalian Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pemutakhiran Data Infrastruktur di Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 170,118,960
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 247,867,400
3	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan di Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 125,648,600
4	Percepatan dan pengendalian Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 279,880,700

Putussibau, 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

KEPALA SUB BAGIAN PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

ttd

ttd

AGUSTINUS STORMANDI, S.E., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 197100805 199403 1 015

HAMBALI, S.T.

Penata Tk. I

NIP. 19800621 200502 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUDI HARTONO, S.E., M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : BUNG TOMO, S.Hut, M.M

Jabatan : Plt.Asisten Pengadaan Barang dan Jasa dan Pembangunan Sekretariat Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Juni 2019

PIHAK KEDUA,

ttd

BUNG TOMO, S.Hut, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700604 199803 1 009

PIHAK PERTAMA,

ttd

RUDI HARTONO, S.E., M.Si
PEMBINA
NIP. 19700706 199903 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah	% pengadaan barang dan jasa melalui eprocurement	100%
2	Meningkatnya kematangan kelembagaan ULP	Tingkat kematangan ULP	5 Tingkatan

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 142,450,000
2	Pengadaan Mebeulair	Rp 29,700,000
3	Pendidikan dan pelatihan formal	Rp 205,975,000
4	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 1,723,076,850
5	Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	Rp 157,371,500
6	Pendampingan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 358,275,500
7	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Tenis Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 130,676,700
8	Sosialisasi Peraturan Tentang Pengadaan Barang/Jasa	Rp 79,559,700
9	Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Rp 321,068,000
10	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan aplikasi e-Procurement	Rp 26,070,000
11	Pemutakhiran Data Pengguna Aplikasi E-Procurement pada LPSE Kapuas Hulu	Rp 26,496,800

Putussibau, Januari 2019

Pihak Kedua

Plt. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

ttd

BUNG TOMO, S.Hut., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590816 198503 1 014

Pihak Pertama

KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

ttd

RUDI HARTONO, S.E., M.Si
Pembina
NIP. 19700706 199903 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALDIANSYAH, S.T.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : RUDI HARTONO, S.E., M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

ttd
RUDI HARTONO, S.E., M.Si
PEMBINA
NIP. 19700706 199903 1 008

Putussibau, Juni 2019

PIHAK PERTAMA,
ttd
ALDIANSYAH, S.T.
PENATA
NIP. 19680817 199403 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta	80 Pengurus Desa di 4 Kec
		Laporan Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Barann dan Jasa	4 Dokumen Laporan
2	Terlaksananya Pendampingan dan Advokasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Sanggahan yang ditindaklanjuti	100%
3	Tersusunnya Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen yang disahkan	1 Dok
4	Terlaksananya Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Peserta dari seluruh OPD	80 Peserta

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	Rp 143,065,000
2	Pendampingan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 325,705,000
3	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Tennis Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 118,797,000
4	Sosialisasi Peraturan Tentang Pengadaan Barang/Jasa	Rp 72,327,000

Putussibau, Januari 2019

Pihak Kedua

KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

ttd
RUDI HARTONO, S.E., M.Si
Pembina
NIP. 19700706 199903 1 008

Pihak Pertama

Pit. KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

ttd
ALDIANSYAH, S.T
Penata
NIP. 19591101 198803 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAKHID FATHONI JULIANTO, S.Kom., M.Si.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : RUDI HARTONO, S.E., M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Juni 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ttd

ttd

RUDI HARTONO, S.E., M.Si
PEMBINA
NIP. 19700706 199903 1 008

WAKHID FATHONI JULIANTO, S.Kom., M.Si.
PENATA
NIP. 19860803 201902 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa melalui UKPBJ Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Paket Pengadaan	150 Paket

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 1,566,433,500

Putussibau, Januari 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

**Pt. KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH**

ttd

ttd

RUDI HARTONO, S.E., M.Si
Pembina
NIP. 19700706 199903 1 008

WAKHID FATHONI JULIANTO, S.Kom., M.Si
Penata
NIP. 19860830 200902 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANTONIUS BUDI, S.Kom., M. AP.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : RUDI HARTONO, S.E., M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Juni 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ttd

ttd

RUDI HARTONO, S.E., M.Si
PEMBINA
NIP. 19700706 199903 1 008

ANTONIUS BUDI, S.Kom., M. AP.
PENATA TK. I
NIP. 19811022 200604 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA SUB BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Tertelaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengguna Aplikasi e-Procurement	Persentase Kendala dalam Penggunaan Aplikasi e-Procurement yang dapat diselesaikan	95%
2	Meningkatnya Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Kapuas Hulu	Persentase Kelancaran Pemberian Layanan Kepada Pengguna LPSE	95%
2	Tertelaksananya Pemutakhiran Data Pengguna Aplikasi e-Procurement	Persentase Data Pengguna Aplikasi e-Procurement yang ter Update	95%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Rp 291,880,000
2	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan aplikasi e-Procurement	Rp 23,700,000
3	Pemutakhiran Data Pengguna Aplikasi E-Procurement pada LPSE Kapuas Hulu	Rp 24,088,000

Putussibau, Januari 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pt. KEPALA SUB BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

ttd

ttd

RUDI HARTONO, S.E., M.Si
Pembina
NIP. 19700706 199903 1 008

ANTONIUS BUDI, S.Kom., M.AP
Penata TK. I
NIP. 19811022 200604 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. IWAN SETIAWAN, M.Si.

Jabatan : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : BUNG TOMO, S.Hut,M.M

Jabatan : Plt.Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ttd

BUNG TOMO, S.Hut, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700604 199803 1 009

ttd

Drs. IWAN SETIAWAN, M.Si.
PEMBINA Tk. I
NIP. 19680103 199403 1 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA BAGIAN ORGANISASI

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terfasilitasinya kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan	Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang terfasilitasi	100%
2	Meningkatnya pengelolaan hibah dan bantuan sosial	Persentase bantuan Hibah bansos yang tersalurkan	100%
		Persentase penerima bansos dan hibah yang menyampaikan laporan tepat	100%
3	Meningkatnya perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Rp 327,344,400
2	Fasilitasi penyelenggaraan Bantuan Sosial	Rp 200,051,000
3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji	Rp 1,443,985,000
4	Fasilitasi Penerimaan Beasiswa Mahasiswa Kedokteran	Rp 225,414,000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat	Rp 49,509,000
6	Fasilitasi penyelenggaraan Hibah	Rp 209,280,600
7	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Kebudayaan	Rp 725,233,800
8	Penyusunan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial (sosial, kemiskinan, kesehatan)	Rp 133,381,500

Putussibau, Januari 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Plt.ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

ttd

ttd

BUNG TOMO, S.Hut., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590816 198503 1 014

Drs. IWAN SETIAWAN, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680103 199403 1 017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIDI SANUSI, S.E., M.AP

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. IWAN SETIAWAN, M.Si.

Jabatan : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Juni 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ttd

Drs. IWAN SETIAWAN, M.Si.
PEMBINA Tk. I
NIP. 19680103 199403 1 017

ttd

DIDI SANUSI, S.E., M.AP.
PENATA
NIP. 19760204 200801 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Jumlah Sekolah yang dibina	9 Sekolah
2	Fasilitasi penyelenggaraan Bantuan Sosial	Jumlah Penerimaan Bantuan Sosial	1025 Orang
3	Pasilitasi Penerimaan Beasiswa Mahasiswa Kedokteran	Jumlah Penerimaan Beasiswa Mahasiswa Kedokteran	5 Orang
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Penanganan Masalah Kesejahteraan Rakyat	3 Kegiatan
5	Penyusunan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial (sosial, kemiskinan, kesehatan)	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan	2 Kebijakan

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Rp 327,344,400
2	Fasilitasi penyelenggaraan Bantuan Sosial	Rp 200,051,000
3	Pasilitasi Penerimaan Beasiswa Mahasiswa Kedokteran	Rp 225,414,000
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat	Rp 49,509,000
5	Penyusunan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial (sosial, kemiskinan, kesehatan)	Rp 133,381,500

Putussibau, Januari 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEPALA SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

ttd

ttd

Drs. IWAN SETIAWAN, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680103 199403 1 017

DIDI SANUSI, S.E., M.AP
Penata
NIP. 19760204 200801 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAMLI, S.Kep

Jabatan : Kepala Sub Bagian Agama dan Budaya

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. IWAN SETIAWAN, M.Si.

Jabatan : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Drs. IWAN SETIAWAN, M.Si.
PEMBINA Tk. I
NIP. 19680103 199403 1 017

RAMLI, S.Kep.
PENATA MUDA Tk. I
NIP. 19820509 200902 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA SUB BAGIAN AGAMA DAN BUDAYA

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji	Jumlah Jama'ah Haji yang mendapatkan Fasilitasi	130 Orang
2	Fasilitasi penyelenggaraan Hibah	Jumlah Penerima Hibah	344 Bantuan
3	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Kebudayaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan dan Kebudayaan	3 Kegiatan

No	Kegiatan	Anggaran
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji	Rp 1,443,985,000
2	Fasilitasi penyelenggaraan Hibah	Rp 209,280,600
3	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Kebudayaan	Rp 725,233,800

Putussibau, Januari 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEPALA SUB BAGIAN AGAMA DAN BUDAYA

ttd

ttd

Drs. IWAN SETIAWAN, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680103 199403 1 017

RAMLI, S.Kep
Penata Muda TK. I
NIP. 19820509 200902 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ABANG EDI SUPARMAN, M.M.

Jabatan : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. H. MUHAMMAD YUSUF, M.M.

Jabatan : Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ttd

Drs. H. MUHAMMAD YUSUF, M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590816 198503 1 014

ttd

Drs. ABANG EDI SUPARMAN, M.M.
PEMBINA
NIP. 19711028 199203 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA BAGIAN ORGANISASI

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya kualitas laporan kinerja instansi pemerintah	Persentase Penyampaian Laporan Kinerja Tepat Waktu	100%
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Publik OPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	100%
3	Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah	Persentase OPD tepat ukuran tepat fungsi	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyusunan LAKIP Kab. Kapuas Hulu	Rp 143,112,000
2	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Rp 370,026,000
3	Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kab. Kapuas Hulu	Rp 133,457,000
4	Penyusunan Formasi ASN Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 180,499,000
5	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Rp 87,328,000
6	Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 106,220,000
7	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten	Rp 101,149,000
8	Pembinaan, Penataan dan Peningkatan Tugas dan Fungsi Unit Kerja Perangkat Daerah	Rp 125,561,900

Putussibau, Januari 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama

ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM

KEPALA BAGIAN ORGANISASI

ttd

ttd

Drs. H. MUHAMMAD YUSUF, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590816 198503 1 014

Drs. ABANG EDI SUPARMAN, M.M.
Pembina
NIP. 19711028 199203 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENGKI GINANJAR, S.STP., M.AP.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kelembagaan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. ABANG EDI SUPARMAN, M.M.

Jabatan : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ttd

ttd

Drs. ABANG EDI SUPARMAN, M.M.
PEMBINA
NIP. 19711028 199203 1 009

HENGKI GINANJAR, S.STP., M.AP.
PENATA
NIP. 19860914 200602 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah	Persentase OPD tepat ukuran tepat fungsi	100%

No	Kegiatan		Anggaran
1	Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kab. Kapuas Hulu	Rp	133,457,000
2	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Rp	87,328,000
3	Pembinaan, Penataan dan Peningkatan Tugas dan Fungsi Unit Kerja Perangkat Daerah	Rp	125,561,900

Putussibau, Januari 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BAGIAN ORGANISASI

KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN

ttd

ttd

Drs. ABANG EDI SUPARMAN, M.M.
Pembina
NIP. 19711028 199203 1 009

HENGKY GINANJAR, S.STP.,M.AP
Penata
NIP. 19860914200602 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDY AFANDI, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tatalaksana

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. ABANG EDI SUPARMAN, M.M.

Jabatan : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Juni 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ttd

ttd

Drs. ABANG EDI SUPARMAN, M.M.
PEMBINA
NIP. 19711028 199203 1 009

DEDY AFANDI, S.E., M.M.
PENATA
NIP. 19821230 201101 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA SUB BAGIAN TATALAKSANA

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya kualitas laporan kinerja instansi pemerintah	Persentase Penyampaian Laporan Kinerja Tepat Waktu	100%
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Publik OPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyusunan LAKIP Kab. Kapuas Hulu	Rp 143,112,000
2	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Rp 370,026,000

Putussibau, Januari 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BAGIAN ORGANISASI

KEPALA SUB BAGIAN TATALAKSANA

ttd

ttd

Drs. ABANG EDI SUPARMAN, M.M.
Pembina
NIP. 19711028 199203 1 009

DEDY AFANDY, S.E., M.M.
Penata
NIP. 19821230 201101 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADE HASAN ASHARI, S.IP., M.Si.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Aparatur

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. ABANG EDI SUPARMAN, M.M.

Jabatan : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ttd

ttd

Drs. ABANG EDI SUPARMAN, M.M.
PEMBINA
NIP. 19711028 199203 1 009

ADE HASAN ASHARI, S.IP., M.Si.
PENATA MUDA TK.I
NIP. 19820520 200401 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA SUB BAGIAN KEBIJAKAN APARATUR

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah	Persentase OPD tepat ukuran tepat fungsi	100%

No	Kegiatan	Anggaran
4	Penyusunan Formasi ASN Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 180,499,000
6	Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 106,220,000
7	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten	Rp 101,149,000

Putussibau, Januari 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BAGIAN ORGANISASI

KEPALA SUB BAGIAN KEBIJAKAN APARATUR

ttd

ttd

Drs. ABANG EDI SUPARMAN, M.M.
Pembina
NIP. 19711028 199203 1 009

ADE HASAN ASHARI, S.IP., M.Si
Penata Muda TK.I
NIP. 19820520 200401 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABANG SUDARMO, S.Sos.

Jabatan : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. H. MUHAMMAD YUSUF, M.M.

Jabatan : Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2019
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

ttd
Drs. H. MUHAMMAD YUSUF, M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590816 198503 1 014

ttd
ABANG SUDARMO, S.Sos.
PEMBINA TK. I
NIP. 19640315 198603 1 030

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kegiatan Kehumasan dalam rangka Penyebarluasan Informasi	Persentase penyebarluasan informasi pembangunan daerah	100%
2	Terwujudnya Keprotokolan Pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelayanan Keprotokolan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 171,600,000
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 21,397,420
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 1,100,000
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 93,500,000
5	Peliputan ekpose, Pendampingan dan Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah	Rp 492,298,400
6	Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Bidang Kehu	Rp 191,353,800
7	Pelayanan Keprotokolan Pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 489,045,700
8	Kerjasama Berita dengan media Cetak	Rp 803,000,000
9	Penyebarluasan Informasi Pemerintahan dan Pembangunan	Rp 124,300,000
10	Pencitraan dan Publikasi Pemerintah	Rp 110,572,000

Putussibau,	Januari 2019
Pihak Kedua	Pihak Pertama
ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM	KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
ttd	ttd
<u>Drs. H. MUHAMMAD YUSUF, M.M.</u> Pembina Utama Muda NIP. 19590816 198503 1 014	<u>ABANG SUDARMO, S.Sos</u> Pembina Tk. I NIP. 19640315 198603 1 030



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADI WAHYUDIO

Jabatan : Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : ABANG SUDARMO, S.Sos.

Jabatan : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ttd

ABANG SUDARMO, S.Sos.
PEMBINA Tk. I
NIP. 19640315 198603 1 030

ttd

ADI WAHYUDIO
PENATA Tk. I
NIP. 19640712 198603 1 030

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA SUB BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya penyebaran informasi pembangunan daerah	Persentase penyebaran informasi pembangunan daerah	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 85,000,000
2	Peliputan ekpose, Pendampingan dan Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah	Rp 447,544,000
3	Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Bidang Kehu	Rp 173,958,000
4	Kerjasama Berita dengan media Cetak	Rp 730,000,000
5	Penyebarluasan Informasi Pemerintahan dan Pembangunan	Rp 113,000,000
6	Pencitraan dan Publikasi Pemerintah	Rp 100,520,000

Putussibau, Januari 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

**KEPALA SUB BAGIAN HUBUNGAN
MASYARAKAT**

ttd

ABANG SUDARMO, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19640315 198603 1 030

ttd

ADI WAHYUDIO
Penata Tk. I
NIP. 19640712 198603 1 030



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISMUNADI

Jabatan : Kepala Sub Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : ABANG SUDARMO, S.Sos.

Jabatan : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Juni 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ttd

ttd

Drs. ABANG SUDARMO, S.Sos.

PEMBINA Tk. I
NIP. 19640315 198603 1 030

ISMUNADI

PENATA
NIP. 19690729 19903 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kegiatan Kehumasan dalam rangka Penyebarluasan Informasi	Persentase penyebarluasan informasi pembangunan daerah	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pelayanan Keprotokolanan Pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 445,172,000

Pihak Kedua

Putussibau, Januari 2019

Pihak Pertama

KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL

ttd

ttd

ABANG SUDARMO, S.Sos

Pembina Tk. I
NIP. 19640315 198603 1 030

ISMUNADI

Penata
NIP. 19690729 199003 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRI, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. H. MUHAMMAD YUSUF, M.M.

Jabatan : Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ttd

ttd

Drs. H. MUHAMMAD YUSUF, M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590816 198503 1 014

HENDRI, S.Sos., M.Si.
PEMBINA Tk. I
NIP. 19700620 199803 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA BAGIAN UMUM

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima	Persentase kecukupan layanan administrasi perkantoran	100%
2	Terwujudnya kualitas sarana dan prasarana kerja yang memadai	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	100%
3	Terwujudnya Disiplin Aparatur yang tinggi	Persentase kehadiran aparatur dalam satu tahun	100%
4	Terwujudnya kapasitas Aparatur yang profesional	Persentase Aparatur yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 58,000,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 2,560,000,000
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 480,000,000
4	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Rp 200,000,000
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 192,480,000
6	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Rp 486,000,000
7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp 217,400,000
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 200,000,000
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 415,500,000
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp 201,500,000
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 166,000,000
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 882,500,000
13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 1,753,000,000
14	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp 2,675,000,000
15	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Rp 1,000,000,000
16	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	Rp 1,500,092,000
17	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Rp 23,337,900
18	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Telekomunikasi Daerah	Rp 295,754,000
19	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Rp 613,000,000
20	Pengadaan Mebeulair	Rp 440,500,000
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Rumah Jabatan	Rp 317,500,000
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Rp 61,500,000
23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Rp 81,500,000
24	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Rp 3,200,000,000
25	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 700,000,000
26	Penyediaan Jasa Sewa Rumah Jabatan	Rp 65,000,000
27	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas	Rp 586,593,000
28	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Rp 838,273,000
29	Rehabilitasi Sedang / Berat gedung Fasilitas Umum	Rp 1,176,300,000

30	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Rp	314,500,000
31	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Rp	81,500,000
32	Penyelenggaraan Senam Pagi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Kapuas Hulu	Rp	89,000,000
33	Pendidikan dan pelatihan formal	Rp	300,000,000
34	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtis arrealisasi kinerja Sekretariat Daerah	Rp	8,093,000
35	Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD	Rp	14,375,000
36	Penyusunan jurnal dan buku besar Sekretariat Daerah	Rp	10,143,000
37	Pelaksanaan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas	Rp	85,278,000
38	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas	Rp	85,278,000
39	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	Rp	476,430,000
40	Pemeliharaan Komputersasi Keuangan dan Akuntansi Isntansi	Rp	167,200,000
41	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Rp	9,150,000
42	Pengembangan Sistem Aplikasi Data Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Rp	101,500,000

Putussibau, Januari 2019

Pihak Kedua

ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM

ttd

Drs. H. MUHAMMAD YUSUF, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19590816 198503 1 014

Pihak Pertama

KEPALA BAGIAN UMUM

ttd

HENDRI, S.Sos., M.Si.

Pembina Tk. I
NIP. 19700620 199803 1 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NIZAR PRIMA RAMADAN, S.STP.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : HENDRI, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ttd

HENDRI, S.Sos., M.Si.

PEMBINA Tk. I
NIP. 19700620 199803 1 011

ttd

NIZAR PRIMA RAMADAN, S.STP.

PENATA
NIP. 19900418 201010 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA BAGIAN UMUM**

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima	Persentase kecukupan layanan administrasi perkantoran	100%
2	Terwujudnya kualitas sarana dan prasarana kerja yang memadai	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 58,000,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 2,560,000,000
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 480,000,000
4	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Rp 200,000,000
5	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Rp 486,000,000
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp 217,400,000
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 200,000,000
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 415,500,000
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp 201,500,000
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 166,000,000
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 882,500,000
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 1,753,000,000
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp 2,675,000,000
14	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Rp 1,000,000,000
15	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Rp 613,000,000
16	Pengadaan Mebeulair	Rp 440,500,000
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Rumah Jabatan	Rp 317,500,000
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Rp 61,500,000
19	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Rp 81,500,000
20	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Rp 3,200,000,000
21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 700,000,000

22	Penyediaan Jasa Sewa Rumah Jabatan	Rp	65,000,000
23	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas	Rp	586,593,000
24	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Rp	838,273,000
25	Rehabilitasi Sedang / Berat gedung Fasilitas Umum	Rp	1,176,300,000
26	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	Rp	476,430,000
27	Pengembangan Sistem Aplikasi Data Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Rp	101,500,000

Putussibau, Januari 2019

Pihak Kedua
KEPALA BAGIAN UMUM

ttd

HENDRI, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19700620 199803 1 011

Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN

ttd

NIZAR PRIMA RAMADAN, S.STP
PENATA
NIP. 19900418 201010 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISNAINI DWI PUSPITA, S.STP., M. AP

Jabatan : Kepala Sub Bagian Aparatur dan Tata Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : HENDRI, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Januari 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ttd

ttd

HENDRI, S.Sos., M.Si.
PEMBINA Tk. I

NIP. 19700620 199803 1 011

ISNAINI DWI PUSPITA, S.STP., M. AP
PENATA

NIP. 19860927 200412 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA BAGIAN UMUM

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terwujudnya Disiplin Aparatur yang tinggi	Persentase kehadiran aparatur dalam satu tahun	100%
2	Terwujudnya kapasitas Aparatur yang profesional	Persentase Aparatur yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	Rp 1,500,092,000
2	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Telekomunikasi Daerah	Rp 295,754,000
3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Rp 314,500,000
4	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Rp 81,500,000
5	Penyelenggaraan Senam Pagi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Kapuas Hulu	Rp 89,000,000
6	Pendidikan dan pelatihan formal	Rp 300,000,000
7	Penyusunan Standar Operasional Prosedur OPD	Rp 22,265,000
8	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas	Rp 85,278,000

Putussibau, Januari 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama

KEPALA BAGIAN UMUM

KEPALA SUB BAGIAN APARATUR DAN TATA USAHA

ttd

ttd

HENDRI, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19700620 199803 1 011

ISNAINI DWI PUSPITA, S.STP., M.AP
PENATA
NIP. 19860927 200412 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NAZARIUS HARDI, S.E.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : HENDRI, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, Juni 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ttd

HENDRI, S.Sos., M.Si.
PEMBINA Tk. I

NIP. 19700620 199803 1 011

ttd

NAZARIUS HARDI, S.E.
PENATA

NIP. 19720418 199303 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terwujudnya Penyusunan dan Pelaporan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP SETDA	B
2	Terwujudnya Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Persentase Laporan Tepat Waktu	100%

No	Kegiatan		Anggaran
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp	192,480,000
2	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Rp	23,337,900
3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtis arrealisasi kinerja Sekretariat Daerah	Rp	8,093,000
4	Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD	Rp	14,375,000
5	Penyusunan jurnal dan buku besar Sekretariat Daerah	Rp	10,143,000
6	Pemeliharaan Komputerisasi Keuangan dan Akuntansi Isntansi	Rp	167,200,000
7	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Rp	9,150,000

Putussibau, Januari 2019

Pihak Kedua
KEPALA BAGIAN UMUM

ttd

HENDRI, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19700620 199803 1 011

Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

ttd

NAZARIUS HARDI, S.E.
PENATA
NIP. 19720418 199303 1 004

Lampiran 3

Target dan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran	Indikator	Target	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Sakip Unsur Pelaporan	B	B	100%
		Nilai LPPD	B	B	100%
2	Meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Persentase pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui E-Procurement	100%	97,16%	97,16%
3	Meningkatnya efektifitas pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Daerah	Persentase Aset Tanah Bersertifikat	50%	50%	50%
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	Persentase Nilai IKM	100%	79%	79%
5	Meningkatnya kualitas kelembagaan ekonomi daerah dan rumusan kebijakan dibidang perekonomian	Persentase perumusan kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase BUMD Sehat	100%	75%	75%

Putussibau, Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU



Dra. Hj. Linda Purnama, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690823 198803 2 002

Lampiran 4

Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019 PER PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU					
KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
PROGRAM	KEG				
1	2	3	4	5	6
01.		Pelayanan Administrasi Perkantoran	16,346,884,900	15,160,171,583	92.74
01	001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	59,500,000.00	59,392,500.00	99.82
01.	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2,723,684,000.00	2,169,931,677.00	79.67
01.	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500,000,000.00	494,050,000.00	98.81
01.	006	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	100,000,000.00	46,554,100.00	46.55
01.	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	188,180,000.00	188,180,000.00	100.00
01.	008	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	526,000,000.00	521,583,500.00	99.16
01.	009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	204,500,000.00	124,385,000.00	60.82
01.	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	224,102,200.00	224,102,200.00	100.00
01.	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	421,500,000.00	421,385,500.00	99.97
01.	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	107,500,000.00	105,977,000.00	98.58
01.	013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	980,500,000.00	612,395,000.00	62.46
01.	014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	923,500,000.00	895,450,000.00	96.96
01.	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	87,400,000.00	73,100,000.00	83.64
01.	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	1,909,175,000.00	1,906,124,000.00	99.84
01.	018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	3,460,000,000.00	3,459,913,406.00	100.00
01.	019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	1,325,000,000.00	1,324,900,000.00	99.99
01.	027.	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	1,292,902,000.00	1,245,400,700.00	96.33
01.	031	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	28,111,700.00	28,008,000.00	99.63
01.	035	Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan HUT Kemerdekaan RI	404,630,000.00	404,630,000.00	100.00
01.	041	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Telekomunikasi Daerah	300,504,000.00	274,604,000.00	91.38
01.	046	Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Kota Putussibau	527,754,000.00	527,663,000.00	99.98
01.	047	Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan HUT Prov. Kalimantan Barat	28,245,000.00	28,245,000.00	100.00
01.	048	Penyelenggaraan Peringatan Hari Otonomi Daerah	24,197,000.00	24,197,000.00	100.00
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8,467,916,000.00	7,280,350,980.00	85.98
02.	005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	789,233,000.00	770,310,000.00	97.60
02.	010	Pengadaan Mebeulair	299,000,000.00	293,082,000.00	98.02
02.	018	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Rumah Jabatan	317,500,000.00	317,151,000.00	99.89
02.	020	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	61,500,000.00	61,500,000.00	100.00
02.	022	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	91,500,000.00	78,580,000.00	85.88

1	2	3	4	5	6
02.	024	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	3,600,000,000.00	3,578,465,080.00	99.40
02.	026	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	700,000,000.00	647,022,900.00	92.43
02.	036	Penyediaan Jasa Sewa Rumah Jabatan	63,000,000.00	63,000,000.00	100.00
02.	041	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas	531,610,000.00	496,960,000.00	93.48
02.	042	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	838,273,000.00	835,765,000.00	99.70
02.	045	Rehabilitasi Sedang / Berat gedung Fasilitas Umum	1,176,300,000.00	138,515,000.00	11.78
03.		Program peningkatan disiplin aparatur	485,000,000.00	464,220,000.00	95.72
03.	003	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	314,500,000.00	293,720,000.00	93.39
03.	005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	81,500,000.00	81,500,000.00	100.00
03.	009	Penyelenggaraan Senam Pagi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Kapuas Hulu	89,000,000.00	89,000,000.00	100.00
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	840,333,000.00	658,302,657.00	78.34
05.	001	Pendidikan dan pelatihan formal	840,333,000.00	658,302,657.00	78.34
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	1,586,673,800.00	1,579,502,154.00	99.55
06.	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja Sekretariat Daerah	22,167,000.00	22,163,000.00	99.98
06.	003	Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD	34,330,000.00	34,330,000.00	100.00
06.	010	Penyusunan LAKIP Kab. Kapuas Hulu	268,112,000.00	266,771,044.00	99.50
06.	014	Penyusunan jurnal dan buku besarSekretariat Daerah	21,256,000.00	21,256,000.00	100.00
06.	016	Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD	22,265,000.00	22,265,000.00	100.00
06.	018	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas	85,278,000.00	85,278,000.00	100.00
06.	026	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	476,430,000.00	473,963,927.00	99.48
06.	035	Pemeliharaan Komputersisasi Keuangan dan Akuntansi lsntansi	167,200,000.00	166,650,000.00	99.67
06.	036	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	18,110,000.00	18,110,000.00	100.00
06.	054	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	370,025,800.00	369,965,183.00	99.98
06.	059	Pengembangan Sistem Aplikasi Data Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	101,500,000.00	98,750,000.00	97.29
20.		Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	1,604,740,400.00	1,528,876,917.00	95.27
20.	013	Peliputan ekpose, Pendampingan dan Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah	447,544,000.00	394,898,170.00	88.24
20.	017	Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Bidang Kehumasan dan Protokol	173,958,000.00	172,865,730.00	99.37
20.	022	Rapat Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa	168,687,000.00	168,113,100.00	99.66
20.	026	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah	175,429,400.00	173,179,166.00	98.72
20.	029	Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Promosi Produk Unggulan Daerah (Pertanian, Perikanan dan Pariwisata)	233,708,000.00	224,736,150.00	96.16
20.	032	Pembinaan dan Pengawasan BUMD di Kabupaten Kapuas Hulu	279,024,000.00	270,574,604.00	96.97

1	2	3	4	5	6
20.	037	Penyusunan kebijakan Bina Sarana Perekonomian Daerah (SDA dan Energi)	126,390,000.00	124,509,997.00	98.51
22		Pengadaan Barang dan Jasa	2,127,220,500.00	1,900,530,337.00	89.34
22	001	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	1,635,741,500.00	1,635,660,502.00	100.00
22	004	Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	143,065,000.00	132,914,000.00	92.90
22	005	Pendampingan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	209,690,000.00	2,250,000.00	1.07
22	007	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Tennis Pengadaan Barang dan Jasa	66,397,000.00	57,389,400.00	86.43
22	008	Sosialisasi Peraturan Tentang Pengadaan Barang/Jasa	72,327,000.00	72,316,435.00	99.99
15.		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala	469,587,000.00	442,741,114.00	94.28
15.	008	Pelayanan Keprotokolan Pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	469,587,000.00	442,741,114.00	94.28
16.		Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	438,775,000.00	437,016,763.00	99.60
16	001.	Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	384,037,000.00	382,538,763.00	99.61
16	002.	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan aplikasi e-Procurement	34,850,000.00	34,605,000.00	99.30
16	003.	Pemutakhiran Data Pengguna Aplikasi E-Procurement pada LPSE Kapuas Hulu	19,888,000.00	19,873,000.00	99.92
17.		Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi	794,212,100.00	789,031,790.00	99.35
17.	004	Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kab. Kapuas Hulu	165,342,000.00	162,554,710.00	98.31
17.	006	Penyusunan Formasi ASN Kabupaten Kapuas Hulu	179,892,000.00	179,276,124.00	99.66
17.	009	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	94,354,000.00	93,838,499.00	99.45
17.	008	Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	115,192,200.00	114,618,262.00	99.50
17.	010	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	122,784,000.00	122,562,715.00	99.82
17.	011.	Pembinaan, Penataan dan Peningkatan Tugas dan Fungsi Unit Kerja Perangkat Daerah	116,647,900.00	116,181,480.00	99.60
18.		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	72,724,000.00	71,651,691.00	98.53
18.	005.	Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah pada Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)	72,724,000.00	71,651,691.00	98.53
19.		Penataan Peraturan Perundang-Undangan	946,918,500.00	876,073,232.00	92.52
19.	001	Koordinasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	206,747,500.00	201,735,248.00	97.58
19.	003	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	206,980,000.00	205,401,100.00	99.24
19.	007	Pendokumentasian Produk Hukum Daerah	68,572,000.00	67,707,000.00	98.74
19.	010	Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH)	57,324,000.00	56,641,354.00	98.81
19.	013	Evaluasi Peraturan Perundang-undangan	63,726,000.00	61,576,700.00	96.63
19.	017	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Kab.Kapuas Hulu	201,156,000.00	195,395,948.00	97.14
19.	023	Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kapuas Hulu	80,151,000.00	80,132,101.00	99.98

1	2	3	4	5	6
19.	024	Penyusunan Revisi Perda kabupaten Datiu II Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 1979 tentang Lambang Daerah Kabupaten II Kapuas Hulu	62,262,000.00	7,483,781.00	12.02
20.		Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	771,536,600.00	682,988,638.00	88.52
20.	001	Pemutakhiran Data Infrastrukturnya Kabupaten Kapuas Hulu	143,825,600.00	138,961,550.00	96.62
20.	002	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu	210,614,000.00	178,858,000.00	84.92
20.	003	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan di Kabupaten Kapuas Hulu	109,296,000.00	85,395,943.00	78.13
20.	006	Percepatan dan pengendalian Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu	241,026,000.00	215,838,145.00	89.55
20.	007	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyaluran Penggunaan Dana Tidak Terduga	66,775,000.00	63,935,000.00	95.75
21.		Program Penguatan LSM, Ormas dan Organisasi Sosial Politik	112,120,000.00	107,196,100.00	95.61
21.	001	Pembinaan Ormas, LSM dan OKP	41,989,000.00	39,465,000.00	93.99
21.	003	Monitoring dan Pemeriksaan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	70,131,000.00	67,731,100.00	96.58
23.		Peningkatan dan pengembangan Bidang Sosial	3,314,199,300.00	3,248,624,450.00	98.02
23.	001	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	327,344,400.00	314,067,200.00	95.94
23.	002	Fasilitasi penyelenggaraan Bantuan Sosial	200,051,000.00	199,836,000.00	99.89
23.	003	Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji	1,443,985,000.00	1,425,423,600.00	98.71
23.	005	Pasilitasi Penerimaan Beasiswa Mahasiswa Kedokteran	225,414,000.00	217,445,300.00	96.46
23.	007	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat	49,509,000.00	35,898,500.00	72.51
23.	010	Fasilitasi penyelenggaraan Hibah	209,280,600.00	201,287,300.00	96.18
23.	011	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Kebudayaan	725,233,800.00	722,648,650.00	99.64
23.	018	Penyusunan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial (sosial, kemiskinan, kesehatan)	133,381,500.00	132,017,900.00	98.98
24.		Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	4,016,194,100.00	3,869,501,169.00	96.35
24.	001	Pengadaan Tanah keperluan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	2,883,175,600.00	2,752,079,456.00	95.45
24.	004	Pengurusan Sertifikasi Tanah Keperluan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	301,515,000.00	290,326,300.00	96.29
24.	005	Inventarisasi dan Monitoring Tanah Milik Pemerintah Daerah	689,089,000.00	685,064,683.00	99.42
24.	007	Penataan Batas-Batas Wilayah Antar Kecamatan	142,414,500.00	142,030,730.00	99.73
25.		Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	665,330,600.00	613,243,929.00	92.17
25.	001	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	665,330,600.00	613,243,929.00	92.17
26.		Peningkatan Dan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan daerah	742,426,000.00	731,326,513.00	98.50
26.	001	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	214,228,000.00	214,204,220.00	99.99
26.	002	Inventarisasi Data Rupabumi kecamatan	109,082,000.00	108,783,825.00	99.73
26.	004	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pemerintahan	215,052,000.00	213,025,598.00	99.06

1	2	3	4	5	6
26.	005	Rapat Kerja Perangkat Daerah	155,560,000.00	147,148,870.00	94.59
26.	008	Evaluasi dan Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	48,504,000.00	48,164,000.00	99.30
27.		Kerjasama Informasi Dan Media Massa	943,520,000.00	940,157,500.00	99.64
27.	001	Kerjasama Berita dengan media Cetak	730,000,000.00	730,000,000.00	100.00
27.	003	Penyebarluasan Informasi Pemerintahan dan Pembangunan	113,000,000.00	111,279,500.00	98.48
27.	005	Pencitraan dan Publikasi Pemerintah	100,520,000.00	98,878,000.00	98.37
28.		Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	217,494,000.00	212,736,300.00	97.81
28.	001	Forum Kerukunan Antar Umat Beragama	99,467,000.00	98,025,600.00	98.55
28.	004	Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Cinta Tanah Air	118,027,000.00	114,710,700.00	97.19
29.		Pencegahan Tindak Kriminal	555,274,000.00	545,769,700.00	98.29
29.	001	Pencegahan dan Deteksi Dini AGHT (KOMINDA)	131,707,000.00	126,828,300.00	96.30
29.	002	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Penyalahgunaan Narkotika	98,140,000.00	95,393,700.00	97.20
29.	003	Penanganan Konflik Sosial	325,427,000.00	323,547,700.00	99.42
30.		Pengembangan Wawasan Kebangsaan	410,246,000.00	392,327,400.00	95.63
30.	003	Fasilitasi Peringatan Hari Kebangkitan Nasional	28,509,000.00	28,509,000.00	100.00
30.	004	Fasilitasi Peringatan Hari Kesaktian Pancasila	29,786,000.00	26,786,000.00	89.93
30.	005	Pendidikan Wawasan Kebangsaan	86,417,000.00	74,733,700.00	86.48
30.	007	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai Luhur Budaya Bangsa	70,555,000.00	68,666,400.00	97.32
30.	008	Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Hari Lahir Pancasila	63,726,000.00	63,726,000.00	100.00
30.	009	Fasilitasi Penyelenggaraan Apel Hari Bela Negara	60,426,000.00	60,426,000.00	100.00
30.	010	Forum Pembauran Kebangsaan	70,827,000.00	69,480,300.00	98.10
33.		Pendidikan Politik Masyarakat	241,609,000.00	231,295,700.00	95.73
33.	001	Fasilitasi Pelaksanaan PILEG dan PILPRES	241,609,000.00	231,295,700.00	95.73
TOTAL			46,170,934,800.00	42,800,918,332.00	92.70